

SIARAN PERS

RAPAT KOORDINASI NASIONAL

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2016

“ AKTUALISASI PERAN APIP SEBAGAI *EARLY WARNING SYSTEM* DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL”

Selasa, 23 Agustus 2016, Pukul 09.00 – 16.00 WIB

Aula Gandhi, BPKP Pusat

Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Rakornas APIP) yang akan dibuka Wakil Presiden, Selasa, 23 Agustus 2016 di Aula Gandhi BPKP Pusat diselenggarakan menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakornas APIP 13 Mei Tahun 2015. Tema rakornas kali ini adalah "Aktualisasi Peran APIP Sebagai *Early Warning System* dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional".

Rakornas ini akan diawali laporan Kepala BPKP, Ardan Adiperdana yang dilanjutkan dengan arahan dan pembukaan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Jaksa Agung akan membekali para peserta rakor, yaitu para Inspektur Jenderal Kementerian, Inspektur Utama/Inspektur Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota. Selain pimpinan APIP, hadir sebagai undangan pada rakor ini antara lain Anggota BPK, Pimpinan KPK, para Menteri Kabinet Kerja, Kapolri, Kepala LPNK, dan gubernur.

Usai arahan Wakil Presiden, sambutan para menteri dan Jaksa Agung, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Irjen Kementerian Keuangan, Irjen Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Diskusi ini akan dipandu oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perekonomian dan Kemaritiman

Rakornas ini dihadiri oleh 90 Inspektur Jenderal K/L, 34 Inspektur Provinsi, 68 Inspektur Kabupaten/Kota, beserta para Pejabat Esselon I dan Esselon II BPKP. Dihadiri pula oleh 10 Menteri atau yang mewakili dari Big Spender dan 5 Gubernur, beserta Ketua Pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Melalui rakornas diharapkan peningkatan komitmen dan dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas peran APIP dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Sebagai “mata telinga” dan kepanjangan tangan manajemen pemerintahan, APIP diharapkan dapat memberikan saran yang konstruktif kepada menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Hambatan dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan

dapat diidentifikasi sejak awal oleh APIP untuk dapat segera dilakukan perbaikan. Dengan demikian, program pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan taat aturan. Disamping itu, APIP diharapkan dapat menjadi mitra strategis pimpinan Kementerian/Lembaga dan para Kepala Daerah.

Berikut ini disajikan berapa capaian sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada rakornas tahun lalu. *Pertama*, aktualisasi *Early Warning System* yang diwujudkan antara lain melalui pelaksanaan reuvi penyerapan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan dana desa secara triwulanan pada tahun 2016. Reuvi dilaksanakan secara masif oleh 606 APIP Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dan bersinergi dengan BPKP serta menggunakan aplikasi berbasis *web* sehingga dapat menampilkan data hasil reuvi secara cepat.

Kedua, telah dilakukan Pengawasan Dana Desa oleh BPKP melalui kerja sama antara lain dengan Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk pengembangan program aplikasi pengelolaan keuangan desa yang bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini diberikan secara cuma-cuma untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Saat ini, dari 74.754 desa yang menerima Dana Desa, sebanyak 35.540 desa (47,54%) telah diberikan sosialisasi Siskeudes, dan 17.809 desa (50,11%) telah dilakukan bimbingan teknis. Sedangkan jumlah desa yang telah menerapkan Siskeudes secara penuh berjumlah 4.329 desa (24,31%).

Ketiga, BPKP berkontribusi meningkatkan kualitas akuntabilitas Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan penerapan SIMDA pada 425 Pemerintah Daerah, yang 235 pmda diantaranya telah memperoleh opini WTP dan 141 opini WDP.

Keempat, BPKP telah berupaya meningkatkan kapabilitas APIP. Pada rakornas tahun lalu, 85% APIP berada pada level 1 dari skala 1-5. Hanya 2 (dua) APIP, yaitu Kementerian Keuangan dan BPKP berada pada level 3. Posisi saat ini, 71% APIP berada pada level 1 dan 7 (tujuh) APIP telah memiliki kapabilitas di level 3 yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPKP, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarmasin. Selanjutnya, BPKP akan terus berusaha untuk memenuhi arahan Presiden yang telah dituangkan dalam target RPJMN sebesar 85% APIP memiliki tingkat kapabilitas di level 3 pada tahun 2019.

Melalui koordinasi ini diharapkan peningkatan komitmen dan dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan untuk peningkatan efektivitas peran APIP dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Selain itu, diharapkan pula peningkatan Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP), serta sinergitas APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta langkah-langkah yang strategis yang diperlukan dalam pengawasan pembangunan.

Bagian Humas dan HAL, Biro Hukum dan Humas BPKP, Jl.Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120

Telp/Fax: 021-8584985, situs web: www.bpkp.go.id, surel: humas@bpkp.go.id

CP: Nuri Sujarwati, 081281129932; Tri Endang Mudiastuti, 081218472336;

Harry Bowo, 08159918047; dan Sudarsari Sjamsoe, 08164846224.